

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adiwilaga, *et.al.* 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Andi Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2009, *Dasar-dasar Hukum adat*, Pelita Pustaka, Jakarta.
- Bagas Febry Gunawan, 2020, *Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020* , Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu.
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Jilid 1 Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Cekli Setya Pratiwi, *et.al.* 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Elsa Syarief 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Pupuler Gramedia, Jakarta.

- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Radja Grapindo Persada, Jakarta.
- Herry Purwono, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akutansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joni Emerzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusnadi, 2002, *Masalah Kerja Sama Konflik dan Kinerja*, Taroda, Malang.
- Mukmin Zakie, 2013, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta,
- Maria.S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Kompas, Jakarta, (Selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono II).
- Miriam Budiarto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muchtar Rudianto, 2010, *Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muchammad zaidun, 2004, *mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*, dalam bahan ajar Penyelesaian sengketa alternatif (PSA) universitas Airlangga, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prana Media Group, Jakarta.
- Phillpus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusmanto Hadiman, 2011, *Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Suatu Tinjauan Yuridis Praktis*, Eresco, Bandung.
- Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono, *et. al*, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Samuel Christian, 2008, *Pedoman Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Benda-benda yang Berada diatasnya*, Media Ilmu, Jakarta.
- Soersono, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Salim II).
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria, *et.al*, 2014, *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria*

Perspektif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta.

KARYA TULIS ILMIAH

Sitti Munawwarah, *Makna Valuasi Ekonomi Masyarakat Area Industri Tambang Emas di Desa Rante Balla*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021

Wibowo, *Surat Keterangan Tanah Dan Kaitannya Dengan Pengakuan Tanah-Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertipikat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2015

JURNAL

Adwin Tista, *Perlindungan Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang Mengalami Sengketa*, Jurnal LamLaj Fakultas hukum universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2019.

Hari Hariman Maulana Akbar, Betty Dina Lambok, *"Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan SPPT PBB (Study di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan)"*, Hukum Responsif, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol 10, No. 2, Agustus 2019.

Muhammad Doifullah Fachriza, Susilowati Suparto Dajaan, dan Betty Rubiati, *"Kekuatan SKT Sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan UUPA Dan PP No. 2"*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.

Moh Gandara, *"Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat"*, Khazanah Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 2, Nomor. 3, 2020.

Putri Kemala Dewi Lubis, *"Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan"*, JAKPI, Fakultas Ekonomi, Universitas Medan, Vol. 6, No. 01, April 2019.

Petrus R. G. Sinaga, "*Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah*", Lex et Societatis, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol II, No. 7, Agustus 2014.

Afrik Yunari, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesai Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Inovatif, Vol 2 No. 1, 2016.

Imam Koeswahyono dan Diah Pawestri Maharani, *Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan*, Jurnal Arena Hukum, Vol 15, No. 1, April 2022.

Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian sengketa

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Surat Edaran Menteri ATR/BPN No.1756/15.I/IV/ 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat

WAWANCARA

Hasil Wawancara Muhammad Hamka Sanusi selaku Kepala Desa Boneposi, pada hari Jumat 10 Juni 2022 Pukul 16. 03 WITA.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Sultan selaku staff PT Masmino Dwi Area divisi legal, pada hari kamis 21 April 2022 pukul 14.28 WITA

WEBSITE ONLINE

Ubbe, Ahmad, 2011. "*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*", Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, www.bphn.go.id/.../mekanisme-penanganan-konflik diakses tanggal 28 februari 2021 Pukul 19.08 WITA.

Lihat web melalui, http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4db26-catatan-akhir-tahun-kpa_peluncuran_-1_laporan-konflik-agraria-2020.pdf Diakses pada tanggal 16 Februari 2022, Pukul 15.00 WITA.

Lihat web melalui <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021#:~:text=%22Luas%20kawasan%20hutan%20di%20Indonesia,Ha%20dengan%20realisasi%20penetapan%20hingga> Diakses pada tanggal 16 februari 2022 pukul 20.55 WITA.

Lihat Web melalui: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 15.00 WITA.

Wibowo Tunardy, <http://www.hukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah>, diakses tanggal 25 November 2021, pukul 19. 07 WITA

Lihat web melalui : <https://www.wikiwand.com/id/Latimojong>, Luwu di akses pada tanggal 20 September 2022, Pukul 14.22 WITA

Lihat web melalui: <https://www.indikaenergy.co.id/wp-content/uploads/2021/10/Indika-Energy-Selesaikan-Akuisisi-Nusantara-Resources-Limited-1.pdf> diakses pada tanggal 22 September 2022, Pukul 19.58 WITA.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 7029/UN4.5/PT.01.04/2022

15 Agustus 2022

Lampiran : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Selatan**
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Reza Shaputra**

Nomor Pokok : B022192013

Program : Magister (S2) Kenotariatan

Judul Penelitian : Konflik Antara Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Tanah Dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Penasihat : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

Pembimbing Utama

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping

Waktu Penelitian : Agustus 2022 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

NIP. 19731231 199903 1 003

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Reza Shaputra
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 7029/UN4.5/PT.01.04/2022
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Agustus 2022

Yth. : **Pimpinan PT. MASWINDO DWI AREA**
Kecamatan Latimojong
di
Kabupaten Luwu

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Reza Shaputra**
Nomor Pokok : B022192013
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Konflik Antara Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Tanah Dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu
Penasihat : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. Pembimbing Utama
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Agustus 2022 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

NIP. 19731231 199903 1 003

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Reza Shaputra
- 3 Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 353/PENELITIAN/14.06/DPMPSTSP/VIII/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Surat Izin Penelitian

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Hasanuddin : 7029/UN4.5/PT.01.04/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Reza Shaputra
Tempat/Tgl Lahir : Belopa / 17 Januari 1997
Nim : B022192013
Jurusan : Magister (S2) Kenotariatan
Alamat : Jl. Topoka
Kelurahan Tampumia Radda
Kecamatan Belopa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

**KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DENGAN
PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN
LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN LATIMOJONG DAN BPN LUWU**, pada tanggal 23 Agustus 2022 s/d 23 November 2022

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 23 Agustus 2022
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Universitas Hasanuddin;
4. Mahasiswa (i) Reza Shaputra;
5. Arsip.

Lampiran 3.

18/01/23 10:28

MODI

MODI

FAQ Manual MODI (Perusahaan).

Profil Perusahaan > KAWASAN MASMINDO DWI

Profil Perusahaan

Alamat

Direksi

Perizinan

Data Perusahaan

RIWAYAT

1. Profil Perusahaan

Kode Perusahaan

Nama Perusahaan

Jenis Badan Usaha

No Akta

Tgl. Akta

2. Alamat Perusahaan

Tidak

Peruntukan

Alamat

Alamat

Orang yang dapat dihubungi

1

KANTOR

GEDUNG GRAHA MITRA LT. 10, R. 1002 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV 21, KARET SEMANGGI

3. Pemilik / Pemegang Saham

Tidak

Jenis

Nama

Asal Negara

Persentase (%)

Keterangan

1

Perusahaan Umum

SALU SIWA PTY LTD

AUSTRALIA

75

2

Perusahaan Umum

PT. INDIKA MINERAL INVESTINDO

INDONESIA

25

4. Susunan Direksi

Tidak

Kode

Nama

Jabatan

Periode

1

ABIDIN DP

Direktur Utama

06-10-2021 sampai -

2

ROLKE ADRIAN REINHART DAVID

Direktur

06-10-2021 sampai -

3

TAMMAM JAHNATA

Direktur

06-10-2021 sampai -

4

PURBAJA PANTJA

Komisaris Utama

06-10-2021 sampai -

5

ADI DARMA SHIMA

Komisaris

06-10-2021 sampai -

6

AGDES Rianto SILABAN

Komisaris

06-10-2021 sampai -

5. NPWP Perusahaan

Tidak

Nomor NPWP

Nama NPWP

Alamat NPWP

Dokumen NPWP

Keterangan

1

01824631*****

KAWASAN MASMINDO DWI

GEDUNG GRAHA MITRA LT. 10 RUANG 1002 JL. GATOT SUBROTO KAV 21

Revisi Capaian 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13

Tel. 021 5514242, Fax. 021 5514243

<https://mda.esdm.go.id/portal/DetailPerusahaan/4882?ip=3>

Kontak Kami

kontak.kami@esdm.go.id

Kontak Kami

138

1/2

Lampiran 4.



Lampiran 4.



A photograph of a dirt road in a forested area. Several warning signs are posted along the road. The signs include: 'JAGALAH KELESTARIAN HUTAN' (Protect Forest Sustainability), 'PERMINTAAN KABUPATEN LUWU DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN' (Request of Luwu Regency Forestry and Horticulture Directorate), 'SETIAP ORANG DILARANG MEMBAKAR KAWASAN HUTAN' (Everyone is prohibited from burning forest areas), 'HATI-HATI KELUAR MASUK KENDARAAN PERUSAHAAN' (Caution Vehicle Entry/Exit), and directional signs for 'DESA KEMUDU' and 'DESA TABANG'. The background shows a steep, forested hillside under a clear blue sky.